

Berbagai permasalahan ekonomi yang masih sering dihadapi oleh Indonesia adalah masalah ketimpangan ekonomi regional maupun ketimpangan dalam pendapatan. Jawa Tengah sebagai bagian wilayah Indonesia juga tak luput dari permasalahan tersebut. Meskipun pertumbuhan ekonomi berkembang namun tidak secara langsung dapat mengatasi permasalahan ketimpangan. dipicu oleh sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa orde baru sehingga muncul adanya rasa ketidakadilan dalam pembangunan antar daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah pusat memberikan keluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengurus urusan di daerah dengan memberikan dana perimbangan berupa Dana alokasi khusus, Dana alokasi umum, Dana bagi hasil penerimaannya ditentukan oleh kondisi wilayah tersebut misalnya jumlah penduduk, dan karakteristik wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DAK, DAU, DBH terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dari runtun waktu tahun 2003-2010 menggunakan *data panel*. Metode analisis menggunakan regresi berganda, Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota. Dari hasil Indeks Williamson kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami ketimpangan yang tinggi yaitu rata-rata ketimpangan tinggi 0,956 dengan kriteria  $> 0,4$ . Dari hasil regresi didapatkan hasil DAK, DBH berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi, sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.

***Kata kunci :*** DAK, DAU, DBH, Indeks Williamson.